
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2015 – 2019

Novereta Indah Pratiwi¹⁾, Praptriestrini²⁾

^{1),2)}Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

E-mail: prapti.unsa@gmail.com²⁾

Abstract

This study aims to determine the effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Regional Original Revenue (PAD) on Regional Expenditures in the Regency/City of the Ex-Residency of Surakarta in 2015-2019. This research is a comparative causal research. The research data consists of, DAU, DAK, PAD, and Regional Expenditures originating from the Local Government Budget Realization Report which has been audited by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated as BPK RI) for the period 2015 to 2019. The population in this study is all districts/Cities in the Former Surakarta Residency in 2015-2019, which amounted to 7 Regencies and Cities. Data collection techniques using the documentation method. The prerequisite test of data analysis used normality test, autocorrelation test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The results showed that: (1) DAU had an effect on Regional Expenditure with sig. (0.000) with a level of = 5%. (2) DAK has an effect on Regional Expenditure with sig. (0.003) with a level of = 5%. (3) PAD has an effect on Regional Expenditure with sig. (0.001) with a level of = 5%. 1. Partially and simultaneously the three variables including DAU, DAK, and PAD have an influence on Regional Expenditures in the Regency/City Government of the Ex-Residency of Surakarta in 2015-2019. (3) PAD has an effect on Regional Expenditure with sig. (0.001) with a level of = 5%. 1. Partially and simultaneously the three variables including DAU, DAK, and PAD have an influence on Regional Expenditures in the Regency/City Government of the Ex-Residency of Surakarta in 2015-2019. (3) PAD has an effect on Regional Expenditure with sig. (0.001) with a level of = 5%. 1. Partially and simultaneously the three variables including DAU, DAK, and PAD have an influence on Regional Expenditures in the Regency/City Government of the Ex-Residency of Surakarta in 2015-2019.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Original Revenue, Regional Expenditure*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi kepada setiap daerah untuk dapat mengurus urusan daerah masing-masing termasuk pembiayaan dan pendapatan daerah yang terpisah dari pemerintah pusat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pendapatan daerah maka setiap daerah harus dapat menyusun rencana pendapatan dan belanja yang disebut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pemerintah pusat dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pemerintah daerah sehingga dapat terwujud tata kelola keuangan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2005).

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Pendanaan di sektor publik bersumber dari masyarakat baik dari pendapatan pajak maupun pendapatan non pajak.

Berbeda dengan sektor swasta dimana anggaran adalah bagian dari perusahaan yang tidak dapat

diungkapkan kepada publik, anggaran pada sektor publik justru harus dapat dengan mudah diakses oleh publik yang membutuhkan untuk dapat dikritik, didiskusikan ataupun diberi masukan (Mardiasmo 2018).

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini bermanfaat untuk melihat kinerja sektor publik dalam mengelola dana dan pelaksanaan program kerja yang telah disusun dalam anggaran. Dalam menentukan entitas pelaporannya perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya (Halim, 2014).

Tahap penganggaran sangat penting, karena anggaran yang disusun harus efektif, efisien dan berorientasi pada kinerja sehingga akan bersinergi dengan perencanaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Anggaran menjadi alat pengendali agar tidak terjadi pemborosan dan pengeluaran belanja yang tidak diperlukan. Dengan disusunnya anggaran, pemerintah dapat membuat program prioritas sesuai dengan kebutuhan di masyarakat sehingga pelayanan kepada publik dapat dilaksanakan dengan maksimal. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas (Arbie 2013).

Pada APBD terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dibagi menjadi pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan asli daerah) dan transfer dari pusat (Dana perimbangan) yang antara lain terdiri dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Belanja daerah terdiri atas belanja barang/jasa, belanja pegawai dan belanja modal. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber - sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah saat ini, pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pusat selain pendapatan daerah itu sendiri. Hal ini terlihat pada anggaran daerah yang masih mencantumkan adanya anggaran untuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum sebagai komponen pendapatan disamping pendapatan asli daerah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah (1) Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019?, (2) Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019?, (3) Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019?. Sedangkan Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019? (2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019? (3) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019? (4) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015 – 2019?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

1. Pengertian teori keagenan

Teori agensi adalah hubungan antara principal atau para pemegang saham dan agent atau manager. Teori keagenan merupakan korelasi dimana pemilik mempekerjakan seseorang atau manajer untuk mengelola kegiatan dalam perusahaan. Principal adalah seorang pemilik saham atau disebut juga dengan investor dan agent adalah seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen dalam perusahaan. Konsep dari teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal (Scott, 2015).

2. Hubungan Keagenan dengan Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan pada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif berkaitan dengan kebijakan umum dan program prioritas yang kemudian akan dijadikan acuan untuk membuat plafon anggaran. Eksekutif lebih memiliki keunggulan dalam penguasaan informasi karena eksekutif memiliki pemahaman yang lebih baik terkait birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Transfer DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Dana alokasi khusus dibedakan menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

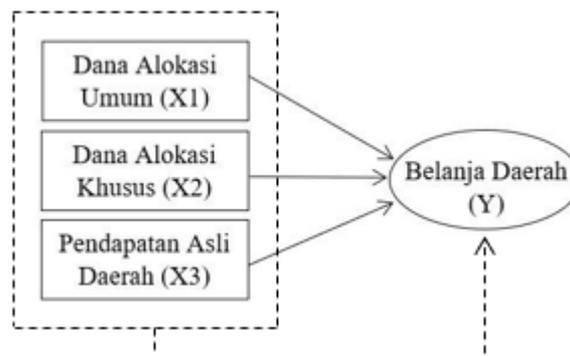
Belanja Daerah

Menurut PP nomor 58 tahun 2005 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Klasifikasi belanja menurut organisasi, fungsi,

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah. Contoh penelitian yang relevan dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ismawulan (2018) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, SILPA dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015, adapun variabel yang diteliti meliputi variabel Bebas: PAD, DAU, DAK, dan SILPA serta variabel terikat: Pertumbuhan Ekonomi, penelitian dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah PAD berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

1. H1: Diduga Ada pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta.
2. H2: Diduga ada pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta.

3. H3: Diduga Ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota eks karesidenan Surakarta yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri serta 1 Kota yaitu Kota Surakarta. Peneliti mengambil sampel pada setiap 7 kabupaten/kota pada tahun 2015-2019 sehingga diperoleh jumlah data yaitu 105. Variabel independen adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel dependen adalah Belanja Daerah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap Belanja daerah. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- β = Slope atau koefisien regresi
- X1 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X2 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e = Error

Sumber: (Bhuono Agung, 2005)

Hasil dari analisis regresi dapat berupa koefisien. Koefisien ini dihitung dengan tujuan untuk meminimalkan penyimpangan antara nilai aktual serta menilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Koefisien korelasi ganda (R) adalah salah satu dari koefisien korelasi, koefisien korelasi ganda disimbolkan dengan $R_{X_1X_2X_3}$ dan merupakan ukuran keeratan hubungan antara variabel terikat dan semua variabel bebas. Rumus uji korelasi berganda (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1.

Hasil Perhitungan Regresi Berganda					
Model	β	T	Sig	Tolerance	VIF
DAU	0,857	9,384	0,000	0,358	2,790
DAK	0,253	3,168	0,003	0,469	2,132
PAD	0,268	3,589	0,001	0,534	1,871

Metode analisis linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah, diukur melalui rumus $Y = -40.640.190.873 + 1,668 \text{ DAU} + 0,626 \text{ DAK} + 0,774 \text{ PAD} + e$.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2.

Hasil Koefisien Determinasi				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,953	0,907	0,898	1,580

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi (Adj. R^2) sebesar

0,898. Hal ini berarti kontribusi DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 89,8%, sedangkan sisanya 10,2% dijelaskan oleh variabel DAU, DAK dan PAD yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Hasil Uji T Parsial

Tabel 3.
Uji Parsial

Variabel	P-Value	Sig.	Keputusan
DAU (X_1)	0,000	0,05	Berpengaruh
DAK (X_2)	0,003	0,05	Berpengaruh
PAD (X_3)	0,001	0,05	Berpengaruh

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, ditunjukkan bahwa variabel DAU memiliki nilai P-Value 0,000 dimana nilai probabilitas ini dibawah 0,05. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berikutnya ditunjukkan bahwa variabel DAK memiliki nilai P-Value sebesar 0,003 dimana nilai probabilitas ini kurang dari 0,05. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai prob. $> 0,05$, maka hal ini berarti secara parsial variabel DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berikutnya ditunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai P-Value sebesar 0,001 dimana nilai probabilitas ini dibawah 0,05. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai prob. $> 0,05$, maka hal ini berarti secara parsial variabel PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 4.
Uji Simultan

Model	df	F	Sig
Regression	3		
Residual	31	101,275	0,000
Total	34		

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai P-Value 0,000 dimana nilai probabilitas ini dibawah 0,05. Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAU, DAK dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa H1 “Diduga ada pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta”, terbukti yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 9,384 > t_{tabel} 1,694$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka belanja daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah dana alokasi umum maka belanja daerah akan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Askam Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004) Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena Hipotesis 1 diterima.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga menyatakan bahwa H2 “Diduga ada pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta”, terbukti yaitu Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, nilai

ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 3,168 < t_{tabel} 1,694$ maka Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah adalah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Daerah akan semakin rendah. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar cenderung memiliki Belanja Daerah yang besar pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Isti Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar Dana Alokasi Khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa H3 “Diduga ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta”, terbukti PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 3,589 > t_{tabel} 1,694$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah akan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya dengan demikian hipotesis 3 diterima.

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah

Dengan uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah, membuktikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,898. Hasil pengujian dengan uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05, F_{tabel} yaitu 3,305 dan F_{hitung} sebesar 101,275 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel DAU, DAK, dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial ketiga variabel meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2019.
2. Secara simultan ketiga variabel meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2019.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan adapun saran yang diberikan peneliti adalah bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan variabel lainnya yang belum diteliti dalam skripsi ini sehingga hasil yang didapatkan lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbie, G.W. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 No. 1: 44-51.
- Bhuono, A.N. (2005). *Strategi jitu memilih metode statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Abdi.
- Ghozali, I. (2011). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, A. (2009). *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irfan, A. (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Jurnal Lintasan Ekonomi* Vol.19. No.2.
- Kosim, E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of management Review*. Vol. 1 No.1: 13-23.
- Kusumawardani, I. 2018. *Pengaruh Pad, Dau, Dak, Silpa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Maharani, M. 2010. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan Asli daerah, dan dana alokasi umum, terhadap belanja modal pada pemerintah daerah se Jawa Tengah". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Penentuan harga pelayanan publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, No. 1.
- Prakosa, K.B. 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI*. Vol. 8 No. 2: 101-118.
- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Scott, R. W. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sumarmi, S. (2009). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 2, No. 3: 142-155.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol 1, No. 2: 142-155.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wandira, A.G. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012)*. Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yovita, F.M. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010)*. Tesis, Semarang: universitas diponegoro.